BAB II

KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

2.1 Tata Kelola Korporat yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2013) pada websitenya mengatakan bahwa secara umum istilah *corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, evaluasi dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Tim *Good Corporate Governance* (GCG) BPKP memudahkan definisi *corporate governance,* sebagai: komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.

Menurut pendapat Wahyudin Zarkashi (2008) dalam bukunya *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya, mendefinisikan *good corporate governance* merupakan struktur yang digunakan oleh *stakeholders*, *shareholders*, komisaris dan manajer untuk menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan, serta sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan dapat mengawasi kinerja.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Definisi menurut Sir Adrian Cadbury, dalam buku Adrian Sutedi (2011) yang berjudul *Good Corporate Governance,* menjelaskan bahwa *good corporate governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. *Corporate governance* juga memberikan penekanan pentingnya penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan pertanggung jawaban kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Adapun menurut pakar lainnya yang ada di dalam buku Adrian Sutedi (2011) yang berjudul *Good Corporate Governance,* antara lain *Center for European Policy Study* (CEPS), memformulasikan *Good Corporate Governance* adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*rights*), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Dengan catatan bahwa hak di sini adalah hak dari seluruh *stakeholders* dan bukan hanya terbatas kepada satu *stakeholders* saja. Noensi, seorang pakar GCG dari Indo *Consult*, Mendefinisikan GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

Dalam buku Adrian Sutedi (2011) yang berjudul *Good Corporate Governance,* menyebutkan bahwa dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *Good*

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Corporate Governance sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. *Good Corporate Governance* secara definisi merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*.

Ada dua hal yang ditekankan pada konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparansi terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Pada prinsipnya *corporate governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, peranan semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam *corporate governance*, transparansi dan penjelasan, serta peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Dalam salam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik *corporate governance* pada BUMN adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Sedangkan sehubungan dengan perubahan peraturan hukum mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good*

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Corporate Governance) yang berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012, tata kelola perusahaan yang baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Adapun definisi menurut *Organization of economic cooperation and development* (OECD), dalam buku Wahyu Kurniawan (2012) yang berjudul *Corporate Governance* dalam Aspek Hukum Perusahaan, *corporate governance* sebagai berikut:

"Corporate Governance relates to the internal means by which corporation are operated and controlled. While goverments play a central role in shaping the legal, institutional and regulatory climate whitin which individual corporate governance systems are developed, the main responsibility lies with the private sector".

OECD melihat *corporate governance* berkaitan dengan sarana internal dari suatu perusahaan yang dioperasikan dan diawasi atau dikendalikan. Dimana pemerintah berperan sebagai sentral untuk menyusun produk hukum, lembaga dan peraturan-peraturan yang mendukung untuk mengembangkan sistem individu tata kelola perusahaan, dan meletakkan tanggungjawab utama pada sektor swasta. Selanjutnya, struktur dari *corporate governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sehingga dengan

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan dan dilakukan dengan baik.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan:

a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para *stakeholders* lainnya.
b. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang, yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan
c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

2.2 Teori mengenai Tata Kelola Korporat yang Baik (*Good Corporate Governance*)

UNIVERSITAS MERCU BUANA

Ada tiga teori tata kelola korporat yang dikembangkan dengan akuntansi yang di cakup dalam studi ini, yaitu *teori penatalayanan, teori keagenan* dan *teori pemegang saham.*

a. *Teori penatalayanan* (*Stewardship theory*)

Adrian Sutedi (2011) mengungkapkan bahwa manajer adalah pelayan perusahaan yang baik dan rajin bekerja untuk mencapai tingkat laba dan

http://digilib.mercubuana.ac.id/

tingkat pengembalian modal yang tinggi bagi pemegang saham. Manajer dapat memotivasi dirinya sendiri serta bekerja dengan inisiatif sendiri dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan teori ini, keberadaan dewan komisaris yang berperan sebagai pengawas direksi mungkin menjadi tidak efektif.

Mendefinisikan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan pribadi masing-masing, tapi gantinya motivasi mereka adalah dihubungkan dengan tujuan dari para pemilik. Teori penatalayanan termasuk membahas sekitar kemampuan manusia untuk dapat dipercaya, tanggung jawab, integritas dan kejujuran kepada orang lain. Dengan kata lain, teori ini percaya bahwa pimpinan perusahaan dapat dipercaya oleh umum dan pemegang saham.

Teori ini berarti juga bahwa para manajer lebih dimotivasi oleh kepentingan publik (atau pemegang saham) dari pada tujuan pribadi mereka masing-masing. Teori ini menghubungkan dua pendekatan (Nordberg, 2011), ada pendekatan melayani diri sendiri dan pendekatan pro organisasi. Dalam pendekatan melayani diri sendiri terdapat perilaku individualistis, yang berarti bahwa perilaku seorang penata layan akan beralih dari kepentingan organisasi mereka. Namun, pendekatan penatalayanan pro organisasi mendorong untuk memaksimalkan kinerja organisasi dengan menggunakan beberapa metode seperti pengaruh rasional, yang dapat diperoleh dan lebih dominan mereka setuju kepada kerjasama yang lebih tinggi, dengan demikian hal itu memberikan kepuasan kepada pemegang saham (Nordberg, 2011).

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

b. Teori keagenan (*Agency theory*)

Teori ini berbicara mengenai pimpinan perusahaan sebagai agen pemegang saham. Mereka akan memprioritaskan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pemegang saham karena mereka memiliki kekuasaan dan tanggung jawab di dalam kontraknya dengan perusahaan.

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Pemilik perusahaan (*principal*) atau pemegang saham (*shareholder*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

Tujuan dari pemisahan pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan *agents*.

Biaya agensi yang timbul dari konflik kepentingan antara *principal* dengan *agents*, yang meliputi *monitoring cost* dan *bonding cost*. Monitoring cost adalah biaya yang timbul karena dilakukannya kegiatan memonitor atau mengawasi kinerja dan perilaku *agent* oleh *principal*. Biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan pemberi pinjaman mengharuskan dilakukannya evaluasi atas perkembangan kinerja dan pengguna pinjaman, termasuk biaya pembuatan laporan-laporan berkala.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Sedangkan *bonding cost* adalah biaya yang timbul karena dilakukannya pembatasan-pembatasan bagi kegiatan *agent* oleh *principal*. Biaya ini dikeluarkan untuk mengikat pengelola perusahaan secara hukum yang berkaitan dengan penggunaan pinjaman.

c. Teori pemegang saham (*Stakeholder theory*)

*Stakeholde*r model, dalam pengertian secara umum menyatakan bahwa tujuan akhir dari *shareholder value*, secara jelas telah gagal untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan, pemasok dan tenaga kerja. Jadi *stakeholder* model yang dimaksud adalah bahwa perusahaan merupakan suatu sistem dari jaringan *stakeholders* yang beroperasi di dalam sistem yang lebih besar dalam suatu sistem masyarakat yang menyediakan infrastruktur pasar dan hukum bagi aktivitas perusahaan.

Tujuan perusahaan dalam hal ini adalah menciptakan nilai bagi seluruh *stakeholders* dengan menciptakan barang dan jasa. Dalam model ini *corporate governance* merupakan sistem yang dirancang untuk memungkinkan dilakukan *check* dan *balance mechanism* untuk menjamin terpeliharanya keseimbangan internal dan eksternal perusahaan.

Nordberg (2011) membagi teori pemegang saham kedalam dua pendekatan: lemah dan kuat. Dalam pendekatan lemah teori tersebut meliputi pegawai, pemasok, dan pelanggan. Pegawai akan memberikan nilai jika mereka berkontribusi ide dan motivasi pada proses produksi. Pemasok akan memberikan nilai jika pemasok berkontribusi dalam pengelolaan pasok

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

berantai dan membagi informasi. Para pelanggan sangat bernilai karena merekalah sumber ide untuk pengembangan produk baru. Dengan demikian, pendekatan lemah menunjukkan bahwa hubungan ketiganya lebih penting di dalam bisnis dan bukan semata-mata suatu rangkaian transaksi (Nordberg, 2011). Pendekatan kuat mengarahkan perhatian lebih kepada nilai pemegang saham. Artinya, tata kelola korporat semata-mata meliputi kepentingan pemegang saham karena pemegang saham memiliki banyak tuntutan-tuntutan yang sah (*legitimate)* pada sumber daya perusahaan.

Pilihan Pemilik

Pilihan manajer	Agen	Penatalayanan
Agen	Meminimalkan biaya potensial Hubungan keagenan bersama	Tindakan oportunis agen Pemilik marah Pemilik ditipu
Penatalayanan	Tindakan pemilik yang oportunis Manager frustasi Manager ditipu	Maksimalkan kinerja potensial Hubungan penata layanan bersama

1	2
3	4

G

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Gambar 2. 1

Model Pilihan Pemilik – Manajer

Gambar 2.1 Menggambarkan Model Pilihan Pemilik dan Manajer. Dalam pengembangan kedua teori, teori keagenan menjadi lebih baik dari pada teori penata layanan karena teori keagenan merefleksikan situasi nyata yang terjadi dalam manajemen perusahaan

Berdasarkan Black, et al (2003) ada dua penjelasan alternatif tentang hubungan antara struktur modal dan kualitas tata kelola korporat, penjelasan pertama adalah suatu teori substitusi, yang menjelaskan bahwa perusahaan yang mempunyai struktur utang yang tinggi dalam struktur modal cenderung lebih disukai oleh kreditur (biasanya dinyatakan dalam hutang kontrak yang terjadi). Penjelasan yang kedua adalah bahwa kreditur mempunyai peran lebih penting dalam praktik tata kelola dibandingkan dengan yang berhutang dimana mereka juga mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibandingkan pada pemegang saham karena para kreditur dapat memaksa perusahaan memperbaiki kualitas tata kelola korporatnya.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.3 Unsur - unsur Tata Kelola Korporat yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Unsur-unsur *good corporate governance* berasal dari dalam perusahaan dan luar perusahaan, hal ini dinyatakan oleh Adrian Sutedi (2011), bahwa unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

2.3.1 Good Corporate Governance – Internal Perusahaan

Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, yaitu *Good Corporate Governance* – Internal Perusahaan. Unsur-unsur yang terkait sebagai berikut:

a. Pemegang saham
b. Direksi
c. Dewan komisaris
d. Manajer
e. Karyawan
f. Sistem remunerasi berdasarkan kinerja
g. Komite audit

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2.3.2 Good Corporate Governance – Ekstenal Perusahaan

Unsur yang berasal dari luas perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan, yaitu *Good Corporate Governance* – Eksternal Perusahaan. Unsur-unsur yang terkait sebagai berikut:

http://digilib.mercubuana.ac.id/

a. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
b. Investor
c. Institut penyedia informasi
d. Akuntan publik
e. Institut yang memihak kepentingan publik bukan golongan
f. Pemberian pinjaman
g. Lembaga yang mengesahkan legalitas

Unsur-unsur *Good Corporate Governance* tersebut harus ada dalam perusahaan yang akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, dalam pelaksanaannya maka harus dibentuk berbagai unsur yang ada di dalam perusahaan dan juga di luar perusahaan. Unsur-unsur yang ada dalam perusahaan merupakan sesuatu yang bisa mengontrol kinerja manajemen dalam melaksanakan kegiatannya, sedangkan unsur dari luar perusahaan merupakan alat acuan dan kontrol bagi manajemen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan.

UNIVERSITAS

2.4 Tata Kelola Korporat dan Saji Ulang

MERCU BUANA

Banyak peneliti sebelumnya memberikan opini yang berbeda tentang saji ulang, mereka sering kali melakukan penelitian untuk menemukan hubungan diantara saji ulang dengan faktor lain, apa yang dapat mempengaruhi saji ulang laporan keuangan, dan banyak evaluasi perusahaan pendukung saji ulang laporan keuangan. Beberapa penelitian telah meneliti reaksi pasar terhadap pengumuman

http://digilib.mercubuana.ac.id/

saji ulang dengan banyak bukti yang mendukung penelitian mereka. Menurut Wu (2001), dia meneliti bahwa ada dua belas persen penurunan jumlah perusahaan yang melakukan saji ulang pendapatannya dan mengumumkannya. Pendapatnya juga didukung oleh Turner et al (2010) yang membicarakan mengenai imbalan negatif sebesar dua belas persen dari saji ulang pendapatan dan lima persen untuk penurunan nilai, restrukturisasi, penurunan nilai lagi dan salah saji lainnya. Palmrose (2004) melaporkan ada penurunan sembilan persen dan pada penelitian berikut, Anderson dan Yohn (2002) ada penurunan 3,9 persen. Semua penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa saji ulang sungguh menjadi biaya bagi pemegang saham karena mereka harus menghabiskan banyak waktu, uang dan hal lain untuk mendukung laporan keuangan supaya tepat dan benar. Penelitian di atas juga didukung oleh penelitian dari Tuna dan Wu (2003) yang telah mengamati manipulasi pendapatan yang sering berakhir pada penyajian kembali laporan keuangan. Hasilnya adalah akrual (*accruals*) berhubungan positif dengan kemungkinan terjadinya saji ulang pendapatan.

Palmrose (2004) telah mengamati imbalan abnormal pada tanggal pengumuman saji ulang laporan keuangan dan hasilnya adalah negatif. Hal ini berarti perusahaan melakukan saji ulang laporan keuangan akan mengakibatkan imbalan negatif dan imbalan abnormal bagi perusahaan. Peneliti masih tentang pasar, Anderson dan Yohn (2002) telah menguji hubungan antara perusahaan yang telah di audit dan memiliki isi laporan keuangan yang di saji ulang. Hasilnya adalah harga saham perusahaan mereka menurun di sekitar tanggal saji ulang dan

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

menciptakan penurunan terbesar bagi perusahaan yang saji ulang pendapatannya karena hal itu adalah area yang sangat sensitif di dalam ancaman penipuan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini akan dijelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menjadi dasar acuan untuk melakukan penelitian ini.

1. Beasley (1996) mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pengawasan yang berdampak pada kecurangan pelaporan keuangan. Hasil identifikasi tersebut diuraikan dalam penelitiannya mengenai hubungan komite audit independen dengan kecurangan pelaporan keuangan. Beasley (1996) menganalisis hubungan antara proporsi anggota komite audit independen dan jumlah rapat komite audit terhadap kecurangan. Hasilnya menunjukkan semakin besar proporsi anggota komite audit independen maka semakin kecil potensi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan dan jumlah pertemuan yang dilakukan komite audit tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan.
2. Agrawal dan Chadha (2005) yang mengamati mekanisme tata kelola korporat dan kemungkinan saji ulang. Mereka mendapati adanya direktur independen yang memiliki keahlian keuangan dapat megurangi saji ulang dan juga membandingkan antara Chief Executive Officer (CEO) yang punya hubungan keluarga dan CEO dari pihak luar. Temuannya adalah CEO yang punya hubungan keluarga memiliki

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

kemungkinan lebih besar untuk menyaji ulang laporan keuangan dari pada CEO dari pihak-pihak luar.

3. Veronica dan Bachtiar (2005) yang mempersepsikan tata kelola korporat mencegah salah saji laporan keuangan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Mereka menemukan bahwa tata kelola korporat memiliki hubungan signifikan dengan probabilitas salah saji di Indonesia.

4. Antonia (2008) menganalisis pengaruh reputasi auditor, proporsi dewan komisaris independen, leverage, kepemilikan manajerial dan proporsi komite audit independen terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini adalah komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, komite audit berpengaruh secara signifikan negatif terhadap manajemen laba.

5. Owens Jackson *et al.* (2009), menganalisis asosiasi antara karakteristik komite audit dan kontrak proses terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Adapun hasilnya adalah komite audit yang memiliki keahlian keuangan, rapat komite audit, *size* dan berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

6. Skousen Jackson *et al.* (2009), mengkaji secara empiris efektivitas teori Cressey (1953) mengenai kerangka faktor risiko kecurangan yang diterapkan dalam SAS No.99 untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

menunjukkan pertumbuhan aset yang cepat, peningkatan kebutuhan uang tunai dan pembiayaan eksternal yang secara positif berkaitan dengan kemungkinan terjadinya *fraud.* Kepemilikan saham eksternal dan internal serta kontrol dewan direksi juga terkait dengan peningkatan *financial statement fraud.* Ekspansi jumlah anggota independen di komite audit berhubungan negatif dengan terjadinya kecurangan.

7. Dwi Shinta Mahesarani (2015) melakukan analisa untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Variabel-variabel dari tata kelola perusahaan yang digunakan adalah proporsi dewan komisaris independen (IND), kepemilikan manajerial (OSHIP), jumlah rapat komite audit (MEET) dan kualitas auditor eksternal (AUD) sebagai variabel moderasi antara pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Temuannya menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit (MEET) berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, proporsi dewan komisaris (IND), kepemilikan manajerial (OSHIP) dan interaksi kualitas auditor eksternal (AUD) dengan rapat komite audit (MEET) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Hasil
Beasley (1996)	Dependen: *Fraudulent Financial Reporting* Independen: komite audit independen, jumlah rapat komite audit	1. Semakin besar proporsi anggota komite audit yang berasal dari luar *board of director* maka semakin kecil potensi kecurangan terjadi 2. Pertemuan yang dilakukan komite audit tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan
Agrawal dan Chadha (2005)	Dependen: CEO keluarga, CEO pihak luar Independen: Direktur, Komite Audit	CEO yang punya hubungan keluaga memiliki kemung-kinan lebih besar untuk menyaji ulang laporan keuangan dari pada CEO dari pihak-pihak luar.
Veronica dan Bachtiar (2005)	Dependen: Probabilitas Independen: Dewan Komisaris, Komite Audit	Tata kelola korporat memiliki hubungan signifikan dengan probabilitas salah saji di Indonesia
Antonia (2008)	Dependen: Manajemen Laba Independen: Reputasi auditor, Proporsi dewan komisaris independen, Leverage, Kepemilikan manajerial, Proporsi komite audit independen	1. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 2. Komite audit berpengaruh secara signifikan negatif terhadap manajemen laba
Owens Jackson *et al.* (2009)	Dependen: *Fraudulent Financial Reporting* Independen: *haracteristic committee*	1. Komite audit yang memiliki keahlian keuangan, rapat komite audit, *size* dan berpengaruh signifikan terhadap terjadinya

UNIVERSITAS MERCUBUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

	audit, size, leverage, managerial ownership	kecurangan pelaporan keuangan 2. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan
Skousen *et al.* (2009)	Dependen: *Financial Statement Fraud* Independen: *Financial stability, personal financial need and ineffective monitoring*	1. Pertumbuhan aset yang cepat, peningkatan kebutuhan uang tunai dan pembiayaan eksternal yang secara positif berkaitan dengan kemungkinan terjadinya *fraud.* 2. Kepemilikan saham eksternal dan internal serta kontrol dewan direksi juga terkait dengan peningkatan *financial statement fraud.* 3. Ekspansi jumlah anggota independen di komite audit berhubungan negatif dengan terjadinya kecurangan.
Dwi Shinta Mahesarani (2015)	Dependen: Kecurangan Laporan Keuangan Independen: Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Rapat Komite Audit, Auditor Eksternal	Jumlah rapat komite audit (MEET) berpengaruh sig-nifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, proporsi dewan komisaris (IND), kepemilikan manajerial (OSHIP) dan interaksi kualitas auditor eksternal (AUD) dengan rapat komite audit (MEET) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Sumber : Data Diolah

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

B. Rerangka Pemikiran

Menurut Cadbury (1992), dia menerangkan tentang pengendalian mekanisme antara tata kelola korporat yang terdiri dari mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal dapat dipisahkan berdasarkan pemegang saham, dewan (dewan komisaris dan para direktur) dan pimpinan perusahaan. Di pihak lain, mekanisme eksternal terdiri dari privat dan pengaturan. Yang termasuk dalam privat adalah akuntan, penasehat hukum, pemeringkat kredit, bankir investasi, media keuangan, penasehat investasi, auditor eksternal dan analisis tata kelola korporat. Untuk pengaturan terkait pada standar, undang-undang, regulasi, keuangan dan pasar.

Berdasarkan informasi tentang kerangka kerja mekanisme tata kelola korporat, dapat dijelaskan hubungan antara tata kelola korporat dengan probabilitas salah saji laporan keuangan. Dalam mekanisme tata kelola korporat dapat dijelaskan enam variabel yang terdiri dari pertama dewan komisaris independen diukur dari proporsi dewan independen. Dewan independen dapat dinilai dari jumlah komisaris independen dari total dewan komisaris yang ada. Variabel kedua adalah persentase kepemilikan institusional. Variabel ketiga adalah kepemilikan blok yang jumlahnya lebih besar dari 5%. Variabel keempat adalah perusahaan audit yaitu kantor akuntan yang mewakili mekanisme eksternal dan merupakan big four auditor. Variabel kelima adalah skala perusahaan yaitu persentase total aset masing-masing perusahaan. Dan variabel keenam adalah leverage yaitu total hutang dibagi total aset masing-masing perusahaan.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Dalam mengidentifikasi kemungkinan salah saji laporan keuangan peneliti menggunakan istilah khusus untuk menjelaskan beberapa kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan kemungkinan salah saji laporan keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Saji ulang dalam modal ini berarti irregularitas akuntansi perusahaan yang dapat diidentifikasi dari catatan atas laporan keuangan dan berdasarkan klasifikasi GAO. Berdasarkan Tuna dan Wu (2003) dikatakan bahwa manipulasi pendapatan seringkali mengakibatkan saji ulang laporan keuangan. Jadi saji ulang laporan keuangan dapat berpengaruh pada masalah pendapatan dan akhirnya masalah itu terhubung dengan tindakan penipuan.

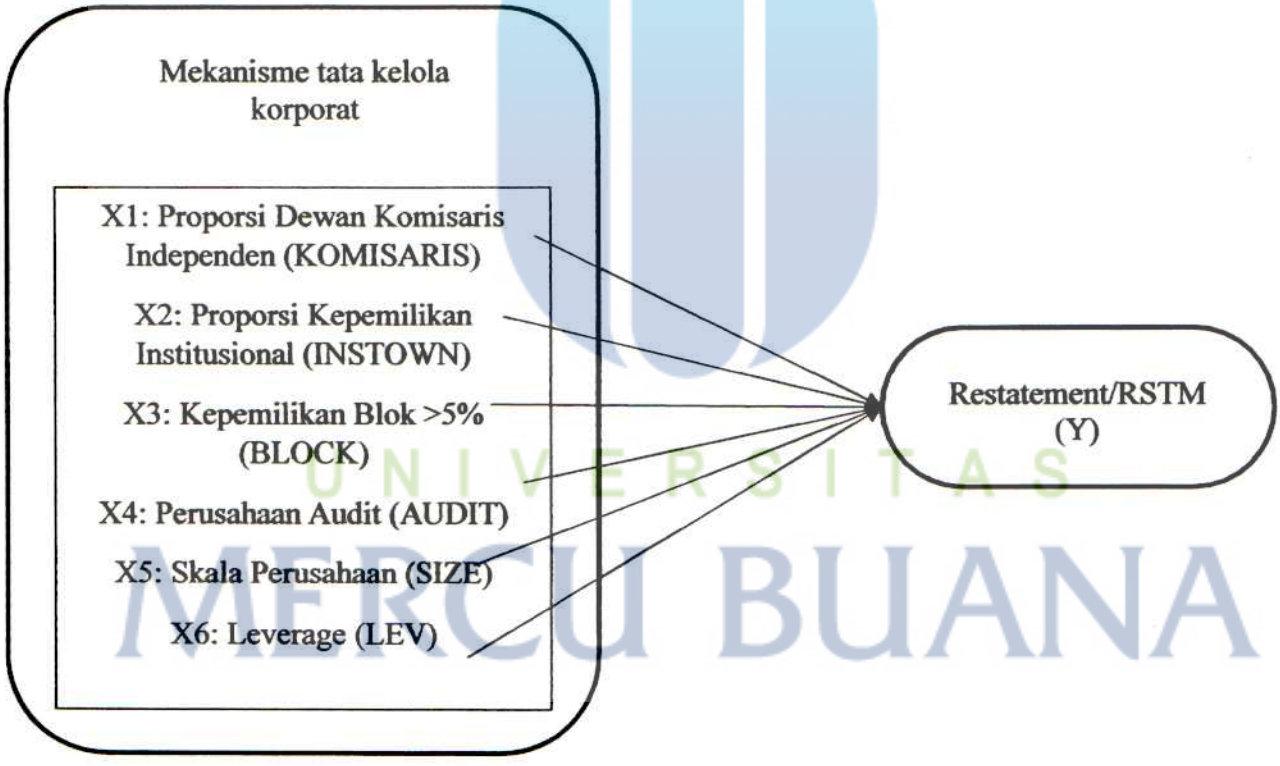

Gambar 2.2

Rerangka pemikiran

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

C. Pengembangan Hipotesa

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh mekanisme tata kelola korporat pada kemungkinan salah saji laporan keuangan. Untuk menjawab pertanyaan pada bab satu, penelitian ini mengembangkan hipotesa berikut:

Hubungan agensi terjadi jika prinsipal mempekerjakan orang lain, dalam hal ini agen untuk melaksanakan pekerjaan yang telah didelegasikan oleh prinsipal. Terjadinya asimetri informasi antara prinsipal dan agen dapat menjadi masalah dalam hubungan agensi.

Asimetri informasi ini dapat menjadi celah terjadinya *fraud.* Untuk menghindari adanya praktik *fraud* dalam perusahaan, dibutuhkan unit pengawas yang mampu memonitoring jalannya perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya *fraud,* dibutuhkan pihak lain yakni dewan komisaris independen. Dewan komisaris dipercaya dan bertanggung jawab mengawasi operasi bisnis setiap harinya termasuk kebijakan-kebijakan yang dibuat manajemen (Chen *et al.*, 2006). Fungsi lain dewan komisaris adalah adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance.*

Adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir kecurangan laporan keuangan. Komisaris yang berasal dari luar tidak memiliki kepentingan terhadap pihak internal perusahaan, akan melakukan pengawasan lebih independen. Hal tersebut mendorong pengawasan yang lebih efektif terhadap

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

perusahaan sehingga kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan karena adanya *agency problem* dapat dicegah. Penelitian Dechow *et al.* (1996) menunjukkan bahwa kecurangan lebih sering terjadi pada perusahaan yang lebih sedikit memiliki anggota dewan komisaris independen (Skousen *et. al.*, 2009).

Yermack (1996) dan Larcker et al (2004) mengatakan bahwa lebih banyak anggota dewan komisaris atau lebih besarnya dewan akan mengakibatkan kinerja lebih tinggi dan mengakibatkan perusahaan mencapai tujuannya. Hal ini di dukung oleh penelitian (menurut Hussainey, 2012), dia menjelaskan bahwa banyaknya anggota dewan komisaris mempunyai dampak paling signifikan pada tata kelola korporat dan studi empiris mengkonfirmasi dampak dari dewan pada kinerja perusahaan (Tu et al., 2007), yang menunjukkan dari dampak produktivitas tata kelola korporat: Laporan Asian Experiance. Namun, lebih besar jumlah anggota dewan komisaris juga mengakibatkan dampak negatif dalam artian bahwa sebagian dari anggota dewan komisaris adalah penumpang gelap dan tidak melakukan tugasnya dengan baik (Veronica & Bachtiar, 2005)

Berdasarkan uraian di atas, didapatkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Proporsi dewan komisaris independen *memiliki hubungan signifikan negatif dengan kemungkinan saji ulang.*

Kepemilikan institusional berbicara tentang berapa persen saham atau modal yang dimiliki suatu institusi keuangan. Kepemilikan institusional bertujuan mengerti dan mengendalikan proses pengambilan keputusan pimpinan mengenai aktivitas

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

bisnis. Kepemilikan institusional ini diukur melalui persentase hak suara dan saham yang dimiliki investor institusional (Beiner et al., 2003).

Berdasarkan Elyansiani dan Jia (2010) ada tiga skenario yang menggambarkan peran institusional. Pertama, skenario monitor aktif, kepemilikan institusional memonitor suatu proses perbaikan kerja dan sebagai pemegang saham yang besar dan canggih, kepemilikan institusional dapat melakukannya dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pemegang saham kecil-kecil, (Shleifer & Vishny, 1986). Lebih jauh menjelaskan bahwa peran monitor aktif ini adalah sejenis investasi jangka panjang dan hal itu mempunyai kuasa untuk mempengaruhi tindakan-tindakan perusahaan dan struktur tata kelola. Kedua, skenario peran pasif, kepemilikan institusional dalam skenario ini tidak berlangsung lama diukur secara investasi karena mereka cenderung hanya sebagai pedagang, kepemilikan ini memperbolehkan penarikan saham segera. Menurut Elyansiani dan Jia (2010) monitor pasif dengan memberikan suatu kasus, jika mereka memegang suatu saham karena saham itu adalah komponen suatu indeks seperti S&P 500, indeks tersebut tidak diharapkan berkorelasi dengan kinerja perusahaan karena saham itu akan lebih stabil karena investor akan tetap mempertahan S&P 500. Karenanya, kepemilikan institusional tidak terlalu pusing dengan kinerja perusahaan karena banyak pertimbangan pada jenis kepemilikan ini untuk melakukan tindakan tentang saham-saham mereka. Salah satu dari pertimbangan ini sebagai contoh adalah perusahaan prioritas dari index (*Priority Company* dari *Index*)

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Terakhir, sebagian kepemilikan institusional setuju berkolaborasi dengan pimpinan perusahaan untuk mengambil alih pimpinan perusahaan yang kecil. Menurut Charlie Weir et al (2000), kepemilikan institusional dibagi menjadi dua, mayoritas dan minoritas. Yang mayoritas dapat mengambil peran pengendalian intern pada perusahaan dan cenderung menprioritaskan kepentingan mereka sendiri, sehigga kadang-kadang mengorbankan minoritas dan mendominasi pengembangan kebijakan. Elyasiani dan Jia (2010) menemukan hubungan positif antara kepemilikan institusional dan kinerja perusahaan. Hasil ini didukung oleh studi Duggal dan Millar (1999) dan Woidtke (2002), suatu proporsi kepemilikan proporsional mengakibatkan kinerja perusahaan yang lebih baik, yang mengakibatkan tata kelola korporat yang baik, sehingga mengurangi kemungkinan salah saji laporan keuangan.

Karena itu,

H2: proporsi kepemilikan institusional mempunyai hubungan signifikan negatif dengan kemungkinan saji ulang laporan keuangan.

Berdasarkan Shleifer et al (1986), sejumlah besar pemilik saham blok dari luar mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam memonitor kinerja manajer. Jika jumlah pemegang saham blok dari luar lebih besar, suatu perusahaan akan dikendalikan lebih ketat, yang bisa mengakibatkan kinerja yang lebih baik dan kemungkinan iregularitas akuntansi yang lebih kecil. Jumlah pemegang saham blok dari luar merefleksikan posisi dari ekuitas perusahaan, berarti hal itu sangat berdampak pada sistem tata kelola perusahaan. Berdasarkan Morck, Shleifer, dan Vishney (1988), dalam jurnal Heflin & Shaw, 2000) mereka menjelaskan bahwa

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

pemegang saham blok dapat dibatasi jika mereka memiliki paling tidak 5% dari saham perusahaan yang memiliki suara, karena mereka punya hak memonitor korporasi perusahaan. Argumen itu juga didukung oleh Kini dan Mian (1995). Berdasarkan pertimbangan di atas, penelitian ini mengambil jumlah pemegang saham blok lebih besar dari 5% sebagai hipotesa dengan kemungkinan saji ulang.

H3: Jumlah kepemilikan blok mempunyai hubungan negatif signifikan dengan kemungkinan saji ulang laporan keuangan.

Frankel et al (2002) menemukan hubungan berlawanan antara auditor independen dan pengelolaan pendapatan. Auditor eksternal membantu perusahaan-perusahaan menentukan kesalahan di laporan keuangan mereka. Jika mereka menemukan kesalahan, auditor akan memberitahukan kepada perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah di saji ulang untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Berdasarkan Becker et al (1998) dan Francis et al (1999) *big six auditors* mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk memaksa klien mereka untuk menggunakan metode dan praktik akuntansi yang memadai, demikian juga untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai praktik dan metode akuntansi mereka sekarang; oleh karenanya, auditor dapat membantu menambah kualitas pendapatan yang dilaporkan, terutama perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan basis akrual (*accruals*). Becker et al (1998) dan Francis et al (1999) kemudian menjelaskan bahwa auditor *big six* memiliki metode yang lebih baik untuk mendeteksi area-area yang salah, menginterpretasikan PABU secara konservatif (mengurangi agresitivitas cakupan *accruals* berdasarkan

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

pengelolaan pendapatan), dan sangat kuat menegosiasi kepada klien yang membutuhkan ayat-ayat jurnal penyesuaian atas laporan keuangan.

Karenanya,

H4: Perusahaan yang diaudit oleh empat perusahaan audit terbesar mempunyai hubungan signifikan negatif dengan kemungkinan sajii ulang laporan keuangan.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/